

BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Husna & Abdullah(2016)membahas terkait Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan data kualitatif. Penelitian ini dilakukan di delapan desa di Kabupaten Pidie. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan bahwa aparatur desa di Kabupaten Pidie sudah siap melakukan pengelolaan keuangan desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terbukti dalam hal ini dari delapan desa yang diteliti hanya satu desa yang masih belum siap dalam proses perencanaan dan pertanggungjawaban. Kendala yang di alami oleh aparatur desa adalah kurang pahamiya atentang pengelolaan keuangan desa, maka dari itu terdapat desa yang meminta bantuan pihak ketiga untuk membantu penyusunan laporan pengelolaan keuangan desa. Untuk meminimalisir kejadian tersebut, pemerintah daerah melakukan pengawasan sekaligus pembinaan melalui sosialisasi.

Nafidah & Anisa(2017) melakukan penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptifkualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa dari tahap perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban sudah dapat dikatakan akuntabel. Terdapat beberapa tahapan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu perancangan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Jika dari semua tahapan tersebut sudah terlaksana, maka perangkat desa sudah dapat dikatakan mengikuti regulasi yang berlaku. Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jombang masih mengalami kendala, yaitu: keterlambatan pencairan anggaran, kemampuan sumberdaya manusia yang terbatas, dan kurangnya pendampingan kepada desa sehingga terkadang menimbulkan pemahaman yang berbeda terkait dengan pengeluaran anggaran untuk kegiatan desa. Terkadang pemahaman ini berbeda antar desa dan pemerintah daerah.

Yuliansyah & Munandar (2017) melakukan penelitian dengan judul Kepatuhan Aparatur Desa dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 untuk mengetahui tentang kepatuhan aparatur desa dalam menjalankan regulasi terkait pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sambas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa terdapat beberapa desa di Kecamatan Sambas yang belum mematuhi peraturan pengelolaan keuangan desa, namun terkait hal ini terdapat beberapa desa yang sudah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 dengan baik, terutama dalam hal penatausahaan keuangan desa. Kendala yang dialami oleh perangkat desa adalah kurangnya sumberdaya manusia sehingga terdapat beberapa desa yang melakukan pelaporan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ferarrow & Suprihanto(2018) melakukan penelitian tentang Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberdadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktis Transparansi dan Akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 sebagai alat analisis dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian dilakukan pada dua desa di Kecamatan Mlati, yaitu desa Sumberdadi dan Tlogoadi. Dalam penelitian ini mengatakan bahwa masih terdapat dinamika dalam pengelolaan keuangan desa. Dinamika yang dimaksudkan adalah adanya pelaksanaan keuangan desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Penelitian yang dilakukan di Desa Sumberdadi menunjukkan bahwa desa sumberdadi sudah melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Berbanding terbalik dengan Desa Tlogoadi yang masih memiliki kendala dalam pengelolaan keuangan desa. Kendala yang di alami Desa Tlogoadi dikarenakan kurang efektifnya pembinaan terhadap aparatur desa sehingga mengakibatkan aparatur desa tersebut kurang paham terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman aparatur desa sangat berpengaruh terhadap proses pengelolaan keuangan desa.

Faradhiba dan Diana (2018) meneliti tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus pada Desa Banjarsari Kabupaten Jombang.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perangkat desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBDes di desa tersebut. Terlihat dengan transparansi dan akuntabilitas perangkat desa di Desa Banjarsari, maka perencanaan dan pelaksanaan APBDes sudah berjalan dengan maksimal. Namun masih terdapat kendala terlihat dengan pencairan sumberdana yang tidak sesuai dengan rencana. Kesimpulan yang di dapatkan yaitu terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan APBDes.

Keterkaitan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah terkait pada pengelolaan keuangan desa yang terfokus pada peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Perbedaan dengan peneliti sebelumnya adalah terfokus pada perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang pada penelitian sebelumnya masih menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

B. Kajian Pustaka

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik (Mardiasmo; 2006:3). Sedangkan menurut UNDP (*United Nations Development Program*) akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan atau kinerja organisasi untuk dapat dipertanggung-

jawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang, dari beberapa pengertian diatas akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatan seseorang atau lembaga terutama dibidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi.

Akuntabilitas dapat diwujudkan dengan pemberian informasi keuangan kepada masyarakat untuk melakukan sebuah penilaian tentang pertanggung-jawaban pemerintah atas semua aktifitas atau kegiatan yang telah dilakukan. Pemberian informasi tidak hanya terkait dengan laporan keuangan saja, melainkan harus memberikan informasi terkait keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dengan berlandaskan *Good Governace*. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas dan kinerja dari instansi pemerintahan agar menjadi instansi yang transparan dan memiliki orientasi pada kepentingan publik atau masyarakat.

Pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan pemerintahan harus memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas. Berikut merupakan prinsip-prinsip akuntabilitas pada instansi pemerintahan menurut (BPKP, 2007) (hlm 7-8) :

- a. Setiap instansi pemerintah baik di level pusat maupun desa harus menerapkan komitmen yang tinggi mulai dari pimpinan hingga seluruh staf yang ada untuk melaksanakan pengelolaan keuangan agar akuntabel;
- b. Harus secara konsisten melaksanakan setiap pengelolaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Melaksanakan pengelolaan harus berorientasi pada pencapaian visi misi, jujur, transparan serta objektif untuk menjadi katalisator instansi pemerintahan dalam bentuk penyusunan laporan akuntabilitas

Menurut Mardiasmo(2004:21) untuk mempermudah pemisahan akuntabilitas, maka didapatkan bahwa terdapat dua jenis akuntabilitas yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas Vertikal: Merupakan pertanggungjawaban atas segala pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Contoh dari akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban daerah kepada pemerintah pusat;
- b. Akuntabilitas Horizontal: Merupakan pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat luas guna memenuhi prinsip akuntabilitas

Menurut Hopwood dan Tomkins, 1984, Elwood, 1993 dalam Mahmudi (2011:19) mengatakan bahwa terdapat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik diantaranya:

- a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dan menaati keseluruhan peraturan yang berlaku. Penggunaan dana publik harus mendapatkan otorisasi dan dilakukan dengan benar. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang sedang disuatu lembaga, sedangkan akuntabilitas kejujuran berdasarkan pada penghindaran penyalahgunaan jabatan;

b. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses merupakan prosedur yang digunakan untuk melaksanakan tugas mencakup sistem informasi maupun prosedur administrasi. Akuntabilitas proses ini dapat berupa pemberian pelayanan publik yang cepas dan responsif;

c. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pencapaian tujuan yang tercapai atau tidak dan juga terkait dengan pertimbangan alternatif program. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai dengan pelaksanaan program. Program lembaga publik hendaknya mencakup strategi dan pencapaian visi misi serta tujuan dari lembaga publik tersebut;

d. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan merupakan pertanggungjawaban lembaga publik atas keseluruhan kebijakan yang telah diambil. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dari dimensi akuntabilitas yang telah di jelaskan dan disebutkan diatas yang bersumber dari Hopwood dan Tomkins, 1984, Elwood 1993 dalam Mahmudi (2011:19) dimensi tersebut dapat diturunkan dalam bentuk indikator antara lain:

a. Akuntabilitas Hukum dan kejujuran:

- 1) Kepatuhan terhadap hukum
- 2) Penghindaran korupsi dan kolusi

b. Akuntabilitas Proses

- 1) Adanya kepatuhan terhadap prosedur
- 2) Adanya pelayanan publik yang responsive
- 3) Adanya pelayanan publik yang cermat
- 4) Adanya pelayanan publik dengan biaya murah

c. Akuntabilitas Program

- 1) Alternatif program yang memberikan hasil optimal
- 2) Mempertanggungjawabkan yang telah dibuat

d. Akuntabilitas Kebijakan

- 1) Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil
- 2) Mempertimbangkan dampak di masa depan

2. Pemerintah Desa

Pemerintah desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan kepala desa serta perangkatnya yang bisa mengelola sumberdaya desa untuk kebutuhan masyarakat, merumuskan dengan baik kebutuhan masyarakat dan membuat perencanaan desa yang baik dengan ketentuan skala prioritas, meningkatkan kemampuan mengimplementasikan peraturan UU Desa secara baik, serta mengelola keuangan desa dengan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel (Silahudin, 2015) (hlm 29). Penelitian yang sama dilakukan oleh Amnulloh (2015:36) mengatakan bahwa musyawarah desa merupakan forum tertinggi di desa yang berfungsi untuk mengambil keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis.

Menurut (Nurcholis, 2011) (hlm 138) pemerintah desa mempunyai beberapa tugas pokok, diantaranya:

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
- b. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Dari tugas pokok tersebut lahir fungsi pemerintah desa yang berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan Menurut Rivai (2004:53) Fungsi pemerintah desa harus diwujudkan dalam interaksi antar individu didalam situasi sosial suatu kelompok masyarakat. Adapun fungsi pemerintah desa secara operasional dapat dibedakan dalam fungsi pokok, yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi Instruktif, Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemerintah sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana pemerintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.
- b. Fungsi Konsultatif, Fungsi ini digunakan sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin perlu konsultasi dengan masyarakat-masyarakat yang di pimpinnya.
- c. Fungsi Partisipasi, Dalam menjalankan fungsi ini pemerintah desa berusaha mengaktifkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat

semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain.

- d. Fungsi Delegasi, Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah. Fungsi delegasi ini pada dasarnya berarti kepercayaan.
- e. Fungsi Pengendalian, Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengantar aktivitas anggotanya secara terarah.

3. Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Menurut Sumpeno (2011:213) APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung perkiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa dapat memiliki sebuah rencana pengelolaan keuangan desa yang terstruktur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa dapat digunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan desa agar tercipta tata kelola yang baik (*Good Governance*). Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) bersumber dari: Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset,

swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain lain pendaptan asli desa;Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota;Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota;Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota;Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Berdasarkan Pengelolaan keuangan desa telah diatur di dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa siklus pengelolaan keuangan desa meliputi:

a. Perencanaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 32 yang mengatur tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa yaitu:

- 1) Sekretaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada kepala desa
- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama musyawarah BPD

- 3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan

b. Pelaksanaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 43 yang mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu:

- 1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Walikota
- 2) Rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan
- 3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.

c. Penatausahaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 63 yang mengatur tentang penatausahaan pengelolaan keuangan desa yaitu:

- 1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan
- 2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum

- 3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

d. Pelaporan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 68 yang mengatur tentang pelaporan pengelolaan keuangan desa yaitu:

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/ Walikota melalui camat
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a) Laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - b) Laporan realisasi kegiatan
- 3) Kepala desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

e. Pertanggungjawaban

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 70 yang mengatur tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yaitu:

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/ Walikota melalui camat akhir tahun anggaran
- 2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa

- 3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
- a) Laporan Keuangan, terdiri atas: laporan realisasi APB Desa; dan catatan atas laporan keuangan
 - b) Laporan realisasi kegiatan; dan
 - c) Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

